

## **DAMPAK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JAYAPURA**

*Istiana Hermawati*

BP2P3KS Kementerian Sosial RI

[istianahermawati@yahoo.co.id](mailto:istianahermawati@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1) indikator kemiskinan lokal, (2) menemukan kontrak kemiskinan lokal, (3) pengaruh proses intervensi dan kualitas program terhadap dampak program pengentasan kemiskinan; (4) kontrak dampak program pengentasan kemiskinan, dan (5) bentuk penerapan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura, baik secara ekonomi, sosial, psikis dan budaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin di Kabupaten Jayapura yang ditentukan dengan teknik *multistage cluster random sampling*. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kuantitatif dan kualitatif, kedua teknik ini digunakan secara simultan. Hasil penelitian yaitu (1) subyek penelitian dalam kategori miskin karena memiliki penghasilan di bawah standar kebutuhan fisik minimum (KFM) Kabupaten Jayapura, (2) kontrak indikator kemiskinan lokal meliputi faktor ekonomi, sosial, psikis dan budaya, (3) Proses intervensi dan kualitas program untuk program keseluruhan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dampak program, (4) kontrak proses intervensi ditentukan oleh indikator *engagement, assessment, designing, implementation, evaluation* dan *termination*, (5) Program pengentasan kemiskinan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan aspek ekonomi, sosial, psikis dan budaya dalam kehidupan subyek penelitian. di Kabupaten Jayapura dibandingkan program sektoral (KUBE).

Kata kunci: *dampak program, program pengentasan kemiskinan*

## **IMPACTS OF THE PROVERTY ALLEVIATION PROGRAM IN JAYAPURA DISTRICT**

*Istiana Hermawati*

BP2P3KS Kementerian Sosial RI

[istianahermawati@yahoo.co.id](mailto:istianahermawati@yahoo.co.id)

### **Abstract**

This study aims to find out: (1) local poverty indicators, (2) local poverty constructs, (3) effects of the intervention process and program quality on the impacts of the poverty alleviation program, (4) constructs of the impacts of the poverty alleviation program, and (5) forms of the implementation of the poverty alleviation program in Jayapura District in terms of economic, social, psychological, and cultural aspects. The research population comprised all poor families in Jayapura Districts and the sample was selected using the multistage cluster random sampling technique. The data were analyzed by means of the quantitative and qualitative techniques, simultaneously employed. The results of the study are as follows. (1) The research subjects are in the poor category because their earnings are below the standard of the minimum physical needs in Jayapura District. (2) The constructs of local poverty indicators include economic, social, psychological, and cultural factors. (3) The intervention process and program quality for the whole program have significant and positive effects on the program impacts. (4) The constructs of the intervention process are represented by indicators of engagement, assessment, designing, implementation, evaluation, and termination. (5) The poverty alleviation program has significant impacts on the improvement of economic, social, psychological, and cultural aspects in the research subjects' life in Jayapura District in comparison with the sectorial (KUBE) program.

*Keywords: impacts of the program, poverty alleviation program*

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi serta memiliki dampak sangat luas terhadap kualitas hidup manusia. Isu kemiskinan menjadi persoalan global umat manusia, karena saat ini jumlah penduduk di negara berkembang masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan (Inten Suweno, 1998:1-2). Sedemikian pentingnya isu kemiskinan dalam kompleksitas permasalahan sosial, maka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia untuk Pembangunan Sosial di Copenhagen Denmark tahun 1995, diagendakan penanganan kemiskinan (*attaching poverty*) sebagai salah satu dari tiga isu penting. Kedua isu penting yang lain adalah pembentukan solidaritas (*building solidarity*) di antara negara-negara di dunia dan perluasan kesempatan kerja (*creating job*) dalam rangka pembangunan sosial. Urgensi masalah kemiskinan juga ditandai dengan adanya komitmen global untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau *MDG's*) yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Salah satu diantara 8 kesepakatan dan menjadi target pertama dari tujuan pertama (*goals*) *MDG's* adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, yang secara konkrit berupa penurunan proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah 1 dolar AS per hari menjadi setengahnya selama periode 1990-2015 ([www.undp.or.id](http://www.undp.or.id)).

Masalah kemiskinan selalu ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Pada masyarakat miskin, kondisi ini diperparah manakala para pembuat kebijakan dan program mengabaikan perbedaan kondisi dan kemampuan berbagai elemen masyarakat di dalamnya, termasuk laki-laki maupun perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak ekonomi, sosial, politik dan kesempatan yang sama untuk peningkatan diri dan kesejahteraan hidupnya.

Menurut *World Bank* (2006:xxiii) ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, yaitu: (1) banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin

tetapi rentan terhadap kemiskinan, (2) ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan tetapi dapat dikategorikan miskin atas dasar kurang akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia, (3) mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Implikasinya, pengentasan kemiskinan hendaknya mempertimbangkan aspek lokalitas atau indikator-indikator lokal yang ada.

Muttaqien (2006:3) mengungkapkan, bahwa kemiskinan menyebabkan efek yang hampir sama di semua negara. Kemiskinan menyebabkan: (1) Hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin (sandang, pangan, papan), (2) Hilangnya hak akan pendidikan, (3) Hilangnya hak akan kesehatan, (4) Tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (5) Termarginalkannya dari hak atas perlindungan hukum, (6) Hilangnya hak atas rasa aman, (7) Hilangnya hak atas partisipasi terhadap pemerintah dan keputusan publik, (8) Hilangnya hak atas psikis, (9) Hilangnya hak untuk berinovasi, dan (10) Hilangnya hak atas kebebasan hidup.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan sudah lama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai program. Namun setelah program penanggulangan kemiskinan yang ada dievaluasi oleh Bapenas pada tahun 2004, diperoleh kesimpulan bahwa program-program tersebut belum membuahkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Artinya, secara umum program-program tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada (Kompas, 9 April 2005). Hal ini mengindikasikan belum efektifnya sebagian besar program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah.

Belum efektifnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang relatif rendah, angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, ketimpangan kemiskinan di Indonesia yang sangat besar, baik antara wilayah (desa-kota) maupun antar pulau. Berdasar data BPS (beberapa tahun terbitan) sebagian besar

penduduk miskin di Indonesia banyak terakumulasi di wilayah pedesaan. Di samping itu, angka kemiskinan tertinggi baik sebelum maupun setelah krisis banyak terakumulasi di wilayah Papua, NTT dan Maluku atau wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan, bahwa ada persoalan kesenjangan yang mendasar terkait dengan masalah kemiskinan di pedesaan dan Wilayah Indonesia Timur. Artinya, ada disparitas (kesenjangan) dalam pembangunan di Indonesia, sehingga wilayah pedesaan dan wilayah Indonesia Timur relatif tertinggal di banding wilayah lainnya di Indonesia.

Ditinjau dari sisi metodologi, kegagalan program pengentasan kemiskinan menurut Dawam Raharjo (2006:xvi) adalah karena kesalahan dalam mendefinisikan konsep kemiskinan, sehingga implikasi metodologis dalam mengukur kemiskinan menjadi bias. Para peneliti mencoba mencari variabel tunggal yang bersifat krusial dalam memaknai kemiskinan, yaitu terbatas pada variabel ekonomi, yang secara global kemiskinan sering diukur dari pendapatan atau pengeluaran yang diperoleh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Seseorang dikatakan miskin apabila secara ekonomi tidak mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan yang diukur menurut batas '*garis kemiskinan*' tertentu. Padahal dimensi kemiskinan adalah majemuk dengan variabel yang kompleks.

Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia adalah contoh bagaimana indikator ekonomi digunakan untuk mengukur kemiskinan. Pertanyaannya adalah bagaimana orang Indonesia mempersepsikan kondisi kehidupan dalam hal kemiskinan dan faktor apa yang mempengaruhi persepsi tersebut yang kemungkinan secara relatif dapat bervariasi menurut karakteristik sosio demografis, status kesehatan dan kejadian dalam hidup (Haworth and Hart, 2007; Gough and Mc. Gregor, 2007; Schyns, 2003; Headney, 2006).

Beberapa penelitian terkait dengan dampak program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan, baik oleh *World Bank*, Lembaga Pemerintah terkait (BPS, Bappenas, Depsos, Perguruan Tinggi) maupun oleh lembaga penelitian swasta atau peneliti independen, secara umum dapat disimpulkan, bahwa pendekatan yang digunakan mayoritas adalah pendekatan kuantitatif. Dengan hanya memprioritaskan pendekatan ini,

maka fenomena kualitatif dari kemiskinan yang terjadi di lapangan tidak tergal.

Memperkuat pendapat Dawam Raharjo, Amelia Maika (2009) dalam disertasinya tentang *'Mengukur Kemiskinan Subyektif di Indonesia'* mengemukakan, bahwa indikator ekonomi bukan satu-satunya metode untuk mengukur kemiskinan. Jika kemiskinan didefinisikan sebagai hasil penilaian individu terhadap kesejahteraannya, maka pengukuran subjektif perlu diperhatikan. Pengukuran subjektif tentang kemiskinan yang dimaksud adalah bagaimana si miskin menilai kemiskinan dari sudut pandang mereka sehingga posisi si miskin menjadi jelas.

Keunggulan menggunakan pengukuran subjektif tidak hanya melengkapi pendekatan obyektif atau pengukuran ekonomi dalam mengukur kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi variabel non-ekonomi yang berpengaruh terhadap penilaian mengenai kemiskinan. Persepsi mengenai kemiskinan subjektif dapat bervariasi dan dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal seperti sosio-demografi, status perkawinan, status pekerjaan, status kesehatan dan pengalaman hidup (Haworth and Hart, 2007; Gough and Mc. Gregor, 2007; Schyns, 2003; Headney, 2006; Burchardt, 2005).

Mengkritisi aspek metodologi dalam mengevaluasi dampak program pengentasan kemiskinan, *World Bank* (2006) mengemukakan, bahwa data kuantitatif yang diperoleh dalam mengukur dampak program pengentasan kemiskinan tidak didukung oleh penilaian kualitatif yang sistematis. Dalam konteks Indonesia, Indonesia mempunyai sedikit pengalaman dalam hal penelitian partisipatoris, tetapi ini kurang disebarkan dan tidak diarusutamakan di tingkat pemerintahan lokal atau pendekatan nasional untuk penelitian kemiskinan, sehingga penelitian yang dilaksanakan cenderung kuantitatif dan kurang bisa menggambarkan fenomena kualitatif kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat persoalan metodologis dalam mengungkap fenomena kemiskinan di Indonesia, terutama yang terkait dengan metode penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan indikator kemiskinan lokal secara komprehensif

dan untuk mengetahui dampak program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Asumsi yang mendasari adalah karena penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilakukan belum memuaskan, sehingga dalam penelitian ini dipandang perlu untuk memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (*mix approach*), memadukan metode penelitian dan metode evaluasi (*mix method*) serta orientasi penelitian tidak hanya berfokus pada dampak (*outcome*) program tetapi juga berfokus pada proses intervensi yang ditempuh dan kualitas program intervensi.

Proses intervensi program sosial menurut Cox (2001) terdiri dari enam tahapan, yaitu persiapan (*engagement*), pengkajian (*assessment*), perencanaan program atau kegiatan (*designing*), implementasi (*implementation*), evaluasi (*evaluation*) dan terminasi (*termination*). Sementara kualitas program menurut Poister (1978) dan world Bank ada tujuh kriteria yaitu: (1) *Effectiveness* (efektivitas), (2) *Efficiency* (efisiensi), (3) *Adequacy* (kecukupan), (4) *Equity* (kesamaan atau pemerataan), (5) *Responsiveness* (responsivitas), (6) *Appropriateness* (ketepatan atau kelayakan), dan (7) *sustainability* (keberlanjutan). Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan intervensi yang benar dengan melibatkan partisipasi penuh dari sasaran dan dengan kualitas program intervensi yang baik diasumsikan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sasaran, baik secara ekonomi, secara sosial, secara psikis maupun secara budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menemukan indikator kemiskinan lokal yang komprehensif, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif di Kabupaten Jayapura; (2) menemukan konstruk yang tepat untuk mengukur indikator kemiskinan lokal; (3) mengetahui besarnya pengaruh proses intervensi dan kualitas program terhadap dampak program pengentasan kemiskinan; (4) menemukan konstruk dampak program pengentasan kemiskinan beserta faktor-faktor pendukungnya; dan (5) menemukan bentuk dampak yang dihasilkan dari penerapan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura, baik secara ekonomi, sosial, psikis dan budaya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *expost facto* karena penelitian ini mencoba menentukan suatu sebab dari sesuatu yang sudah terjadi. Dilihat dari proses pengumpulan data, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *retrospective*, yaitu berusaha mengumpulkan data dari fenomena yang telah muncul tanpa ada intervensi atau perlakuan (*treatment*) dari peneliti. Proses *retrospective* lebih menggantungkan pada deskripsi *ex post facto* berhubungan dengan hasil kegiatan/ program yang sudah berjalan, mengfokuskan penelitian pada apa yang terjadi pada subyek, dan hubungan kausal antar variabel tidak dimanipulasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan digunakan dalam kedudukan yang setara dan saling melengkapi.

Agar dapat menggambarkan fenomena kemiskinan yang sebenarnya, penelitian ini mengambil *setting* di Propinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Hal ini karena Propinsi Papua menurut data BPS (beberapa tahun terbitan) merupakan propinsi dengan angka kemiskinan terbesar di Indonesia (40,83% pada tahun 2005, 41,52% pada tahun 2006, dan 41,33% pada tahun 2008). Sementara angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura menempati urutan terbanyak ketiga di Propinsi Papua setelah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya.

Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin di Kabupaten Jayapura. Sedangkan populasi sampel atau subyek penelitian ini adalah keluarga miskin peserta program sektoral (Program KUBE Fakir Miskin dari Kementerian Sosial RI) dan program lokal (Program Pemberdayaan Kampung/PPK dari Pemda Jayapura) periode 2006-2008. Teknik sampling yang digunakan adalah *Multi Stage Cluster Random Sampling* (penentuan secara bertahap). Besarnya sampel minimum mengikuti kriteria Cohen (1977 : 102 – 103) dengan taraf 0,05, *effect size* 0,20, daya statistik sebesar 0,80 sehingga diperoleh ukuran sampel minimum sebanyak 194 subyek. Penelitian ini melibatkan 219 subyek, sehingga telah memenuhi persyaratan. Adapun untuk penggalian data kualitatif melibatkan 12



informan (pengambil kebijakan/ pengelola program) dan 42 informan penerima program beserta pihak terkait. Teknik sampling yang digunakan untuk pemilihan informan adalah *teknik bola salju* atau menurut Bogdan & Biklen (1982) disebut "*snowball sampling technique*".

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *rating scale*, angket/quesioner, studi dokumenter, wawancara dan lembar pengamatan. Untuk penggalian data kualitatif, digunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) dan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan memanfaatkan data skunder yang ada. Sebelum instrumen diujicobakan terlebih dahulu dilakukan validasi oleh para ahli (*expert judgement*) dan proses validasi pakar/ ahli dilakukan dengan teknik Delphi. Ujicoba instrumen dilakukan terhadap 100 peserta program pengentasan kemiskinan di Distrik Sentani, yang terdiri dari 50 peserta Program KUBE dan 50 peserta Program PPK, peserta diambil secara acak. Hasil ujicoba membuktikan, bahwa instrumen penelitian memiliki validitas dan reliabilitas tinggi karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ) antara 0,84 s.d 0,96 ( $> 0,70$ ). Dari analisis CFA, variabel dalam instrumen memiliki validitas yang baik karena baik untuk variabel indikator lokal maupun variabel proses intervensi, kualitas program dan dampak program semua muatan faktornya  $> 1,96$  atau 2 (nilai kritis) dan muatan faktor standarnya  $\geq 0,50$  (Igbarian, et al.1997)

Sedangkan teknik analisis data adalah secara kuantitatif dan kualitatif, kedua teknik ini digunakan secara simultan. Untuk pengujian konstruk variabel digunakan *confirmatory factor analysis* (CFA), untuk pengujian hubungan kausalitas antar variabel digunakan *hybrid model* dengan teknik *structural equation model* (SEM), keduanya menggunakan bantuan *software LISREL*; sedangkan untuk pengujian perbedaan pengaruh dampak program pengentasan kemiskinan digunakan uji beda *t-paired* dengan bantuan *software SPSS 14.00*. Adapun untuk data kualitatif dianalisis secara diskriptif interpretatif.

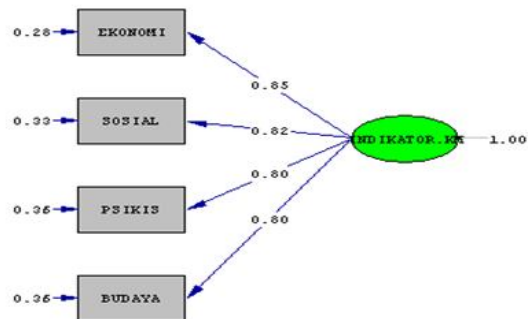
## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Indikator Kemiskinan Lokal Kab. Jayapura

Secara obyektif, 56,6% subyek penelitian dalam kategori miskin karena memiliki penghasilan di bawah standar KFM Kab. Jayapura (Rp.600.000,-) per bulan. Secara subyektif, sebelum menerima program pengentasan kemiskinan, 63% subyek penelitian menyatakan dirinya dalam keadaan *miskin* dan setelah mengikuti program 58,91% subyek penelitian menyatakan dalam keadaan *cukup*. Menurut hasil analisis, peningkatan pendapatan subyek penelitian sebelum dan setelah mengikuti program pengentasan kemiskinan terbukti signifikan (nilai  $r$  sebesar  $0,833 > r$  tabel).

### Pengujian Konstruk Indikator Kemiskinan Lokal

Hasil pengujian menunjukkan, bahwa indikator kemiskinan lokal didukung oleh data empiris ( $\chi^2 = 5,55 > 0,05$ ;  $P\text{-value} = 0,062 > 0,05$ , NFI, CFI, IFI, RFI, GFI dan AGFI semua  $> 0,90$ ), semua manifes memiliki  $t$  hitung  $> 2$  dan semua muatan faktor standarnya  $> 0,70$  sehingga dapat dikatakan, bahwa konstruk yang dihipotesiskan pada penelitian ini cocok dengan data empiris. Ini berarti variabel ekonomi, sosial, psikis dan budaya merupakan variabel yang tepat untuk mengukur kemiskinan di Kab. Jayapura.

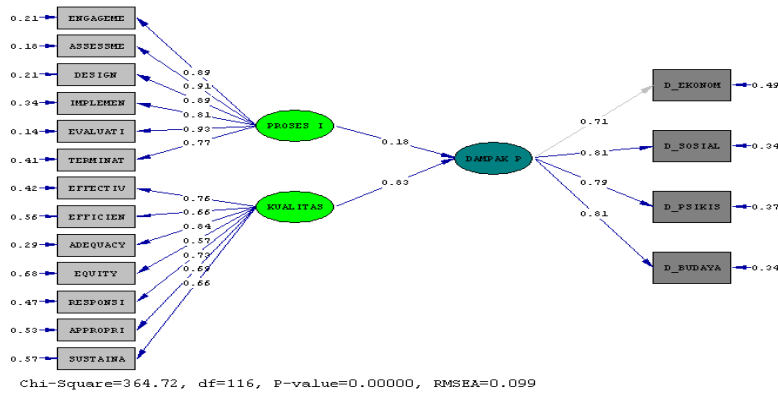


Chi-Square=5.55, df=2, P-value=0.06245, RMSEA=0.090

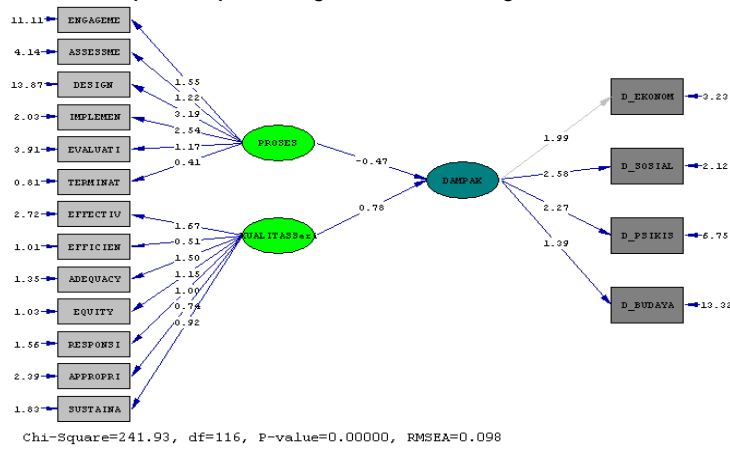
Gambar 1. Hasil Analisis Konstruk Indikator Kemiskinan Lokal

### Pengujian Pengaruh Proses Intervensi dan Kualitas Program Terhadap Dampak Program Pengentasan Kemiskinan.

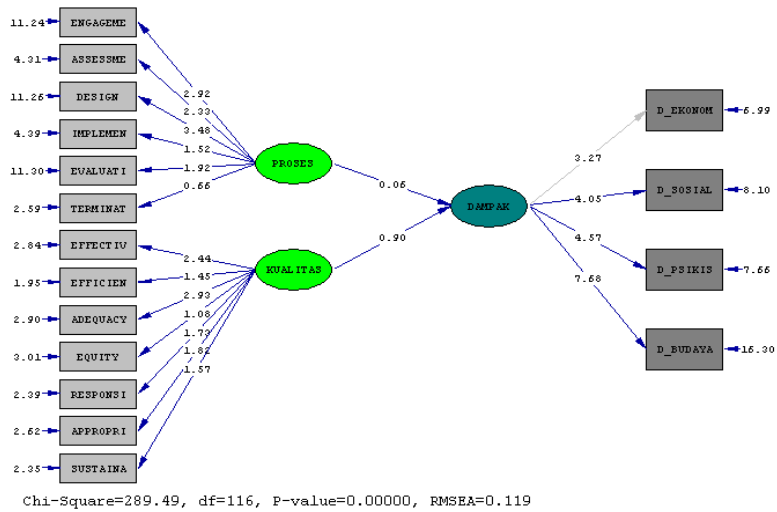
Hasil pengujian pengaruh proses intervensi dan kualitas program terhadap dampak program pengentasan kemiskinan, baik untuk program keseluruhan maupun untuk masing-masing program (KUBE / PPK) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Analisis Pengaruh Proses Intervensi dan Kualitas Program Terhadap Dampak Program untuk Program Keseluruhan N=219



Gambar 3. Hasil Analisis Pengaruh Proses Intervensi dan Kualitas Program Terhadap Dampak Program untuk Program KUBE (N=113)



Gambar 4. Hasil Analisis Pengaruh Proses Intervensi dan Kualitas Program Terhadap Dampak Program untuk Program PPK (N=106)

a. Analisis Hubungan kausal

Nilai-t dan koefisien persamaan struktural pada model struktural pengaruh proses intervensi dan kualitas program terhadap dampak program PK untuk program keseluruhan, program KUBE dan Program PPK adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaruh Proses Intervensi dan Kualitas Program Terhadap Dampak Program

| No | Analisis Program    | Path                         | Estimasi | Nilai-t | Kesimpulan       |
|----|---------------------|------------------------------|----------|---------|------------------|
| 1  | Keseluruhan (N=219) | Proses Intervensi → Dampak P | 0,18     | 3,37    | Signifikan       |
|    |                     | Kualitas Program → Dampak P  | 0,83     | 9,87    | Signifikan       |
| 2  | KUBE (N=113)        | Proses Intervensi → Dampak P | 0,47     | -2,49   | Signifikan       |
|    |                     | Kualitas Program → Dampak P  | 0,78     | 3,93    | Signifikan       |
| 3  | PPK (N=106)         | Proses Intervensi → Dampak P | 0,06     | 0,84    | Tidak Signifikan |
|    |                     | Kualitas Program → Dampak P  | 0,90     | 8,38    | Signifikan       |

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa:

- 1) *Untuk program keseluruhan.* Pada persamaan struktural pertama, nilai  $t$  dari koefisien proses intervensi adalah  $3,37 > 2$  yang berarti koefisien proses intervensi, yaitu  $0,18$  adalah signifikan. Ini berarti, bahwa apabila proses intervensi dinaikkan, maka akan diikuti dengan kenaikan dampak program. Pada persamaan kedua, nilai  $t$  dari koefisien kualitas program adalah  $9,87 > 2$  yang berarti koefisien kualitas program yaitu  $0,83$  adalah signifikan. Artinya, apabila kualitas program dinaikkan, maka akan diikuti kenaikan dampak program.
- 2) *Untuk Program KUBE.* Pada persamaan struktural pertama, nilai  $t$  dari koefisien proses intervensi adalah  $-2,49$  dan absolut  $-2,49$  yaitu  $2,49 > 2$  yang berarti koefisien proses intervensi, yaitu  $-0,47$  adalah signifikan. Ini berarti, bahwa apabila proses intervensi dinaikkan, maka dampak program akan menurun. Sebaliknya, apabila proses intervensi diturunkan, maka dampak program akan meningkat. Hal ini dapat dimaknai lebih lanjut, bahwa pada program sektoral (KUBE) proses intervensi relatif kurang didukung oleh sasaran/ masyarakat karena kurang relevan dengan kearifan lokal yang ada sehingga dampak yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Pada persamaan kedua, nilai  $t$  dari koefisien kualitas program adalah  $3,93 > 2$  yang berarti koefisien kualitas program yaitu  $0,78$  adalah signifikan. Ini berarti apabila kualitas program dinaikkan, maka akan diikuti dengan kenaikan dampak program.
- 3) *Untuk Program PPK.* Pada persamaan struktural pertama, nilai  $t$  dari koefisien proses intervensi adalah  $0,84 < 2$  yang berarti koefisien proses intervensi, yaitu  $0,06$  adalah tidak signifikan. Ini berarti, bahwa pengaruh proses intervensi terhadap dampak program untuk program lokal adalah lemah. Apabila proses intervensi dinaikkan maka akan diikuti oleh kenaikan dampak program, namun kenaikan yang diperoleh tidak signifikan. Pada persamaan kedua, nilai  $t$  dari koefisien kualitas program adalah  $8,38 > 2$  yang berarti koefisien kualitas program yaitu  $0,90$  adalah signifikan. Makna dari angka ini adalah, bahwa pada program PPK, kualitas program mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap dampak program, sehingga apabila ingin

dampak program meningkat, maka dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas program.

Menyimak hasil analisis tersebut di atas, maka persamaan fungsi struktural untuk program keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut.

$$\text{Dampak} = 0,18\text{Proses}^{\text{sig}} + 0,83\text{Kualitas}^{\text{sig}}$$

Sementara persamaan fungsi struktural untuk program KUBE dapat ditulis sebagai berikut.

$$\text{Dampak} = -0,47\text{Proses}^{\text{sig}} + 0,78\text{Kualitas}^{\text{sig}}$$

Sedangkan persamaan fungsi struktural untuk program PPK dapat ditulis sebagai berikut.

$$\text{Dampak} = 0,06\text{Proses}^{\text{sig}} + 0,90\text{Kualitas}^{\text{sig}}$$

#### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Joreskog (1999),  $R^2$  pada persamaan struktural tidak mempunyai interpretasi yang jelas dan untuk menginterpretasikan  $R^2$  seperti persamaan regresi, bisa diambil dari *reduced form equation*. Dengan demikian, dari kedua persamaan pada *reduced form equation*, dapat dinyatakan, bahwa:

- 1) Untuk program keseluruhan, 3,24% dari variasi pada dampak program dijelaskan oleh proses intervensi, sementara kualitas program dapat menjelaskan variasi sebesar 68,89%.
- 2) Untuk program KUBE, proses intervensi menjelaskan 22% variasi dari dampak program dan kualitas program dapat menjelaskan variasi sebesar 61%.
- 3) Untuk program PPK, proses intervensi tidak bisa menjelaskan variasi dari dampak program, sementara kualitas program dapat menjelaskan variasi sebesar 81%.

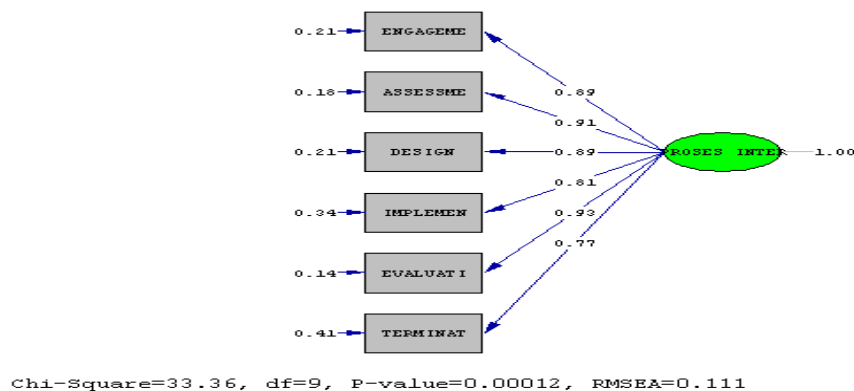
Dari hasil analisis terhadap koefisien determinasi dapat disimpulkan, bahwa proses intervensi memiliki variasi yang relatif kecil terhadap dampak program dibanding kualitas program, baik untuk program keseluruhan maupun untuk program parsial (KUBE dan PPK).

Hasil analisis secara umum (berdasarkan data keseluruhan) dapat disimpulkan, bahwa proses intervensi dan kualitas program berpengaruh

secara signifikan, sehingga kontribusinya dalam menjelaskan dampak program tidak bisa diabaikan. Untuk program parsial, ada permasalahan dalam proses intervensi, baik untuk program sektoral (KUBE) maupun lokal (PPK) sehingga menyebabkan kurang efektifnya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Pada program KUBE, proses intervensi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap dampak program. Sedangkan pada program PPK, pengaruh proses intervensi terhadap dampak program positif tetapi tidak signifikan. Sementara kualitas program terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap dampak program, baik untuk program keseluruhan, program KUBE maupun program PPK.

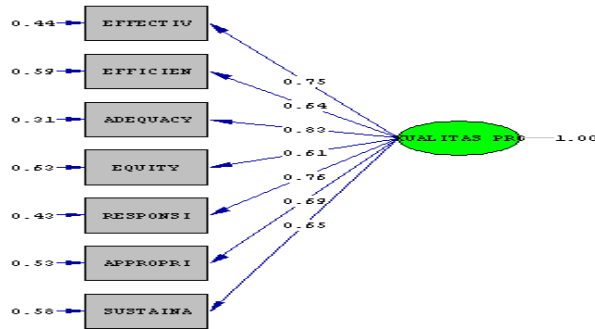
**Pengujian Konstruk Dampak Program dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.**

Hasil pengujian konstruk menunjukkan, bahwa proses intervensi berhasil direfleksikan oleh komponen *engagement, assessment, designing, implementation, evaluation* dan *termination* ( $\chi^2 = 33,36 > 0,05$ ; NFI, NFI, CFI, IFI, RFI, GFI dan AGFI semua  $> 0,90$ ); semua manifes memiliki t hitung  $> 2$ , semua muatan faktor standarnya  $> 0,70$  dan nilai reliabilitas konstruk = 0,948, sehingga dapat dikatakan, bahwa konstruk yang dihipotesiskan pada penelitian ini cocok dengan data empiris.



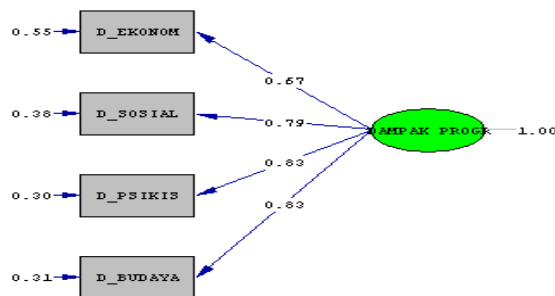
Gambar 5. Hasil Analisis Konstruk Proses Intervensi untuk Program Keseluruhan(N=219)

Kualitas program berhasil direfleksikan oleh komponen *effectiveness*, *efficiency*, *adequacy*, *equity*, *responsiveness*, *appropriateness* dan *sustainability*. ( $\chi^2 = 28,81 > 0,05$ ; RMSEA=0,07 < 0,08; NFI, CFI, IFI RFI dan GFI, dan AGFI > 0,90), semua manifes memiliki t hitung > 2 dan nilai reliabilitas konstruk = 0,874 sehingga dapat dikatakan, bahwa konstruk yang dihipotesiskan pada penelitian ini cocok dengan data empiris.



Chi-Square=28.81, df=14, P-value=0.01108, RMSEA=0.070

Gambar 6. Hasil Analisis Konstruk Kualitas Program untuk Program Keseluruhan (N=219)



Chi-Square=22.88, df=2, P-value=0.00001, RMSEA=0.219

Gambar 7. Hasil Analisis Konstruk Dampak Program untuk Program Keseluruhan(N=219)



Dampak program berhasil direfleksikan oleh komponen ekonomi, sosial, psikis dan budaya. ( $\chi^2 = 22,88 > 0,05$ ; NFI, CFI, IFI, RFI, GFI dan AGFI semua  $> 0,90$ ). Semua manifes memiliki t hitung  $> 2$ , dan nilai reliabilitas konstruk = 0,863 sehingga dapat dikatakan, bahwa konstruk yang dihipotesiskan pada penelitian ini cocok dengan data empiris.

### **Identifikasi Dampak Program Pengentasan Kemiskinan**

Hasil analisis dampak pengentasan kemiskinan secara ekonomi sebagai berikut:

Untuk program keseluruhan ada perbedaan secara signifikan rata-rata penghasilan responden sebelum dan setelah mengikuti program Pengentasan Kemiskinan, baik *untuk program keseluruhan* (r hitung: 0,833  $> 0,00$  r(sign); t hitung:  $\pm 7,485 > 0,00$  (t sig.2 tailed)), *untuk Program KUBE* (r hitung: 0,904  $> 0,00$  r(sign); t hitung:  $\pm 6,330 > 0,00$  (t sig.2 tailed)) maupun *Program PPK* (r hitung: 0,929  $> 0,00$  r (sign); t hitung:  $\pm 7,484 > 0,00$  (t sig.2 tailed)).

Faktor atau dimensi yang digunakan dalam analisis faktor terhadap variabel dampak ekonomi mampu menjelaskan variasi sebesar 50,7 (untuk program keseluruhan), 36,90 (untuk program KUBE) dan 69,8 (untuk program PPK). Dukungan faktor/dimensi terhadap variabel dampak ekonomi untuk program keseluruhan relatif tinggi (sebesar 65,9 s.d 77,5), relatif sedang untuk program KUBE (sebesar 46,1 s.d 72,8) dan relatif sangat tinggi untuk Program PPK (sebesar 82,3 s.d 88,0).

Faktor atau dimensi yang digunakan dalam analisis faktor terhadap variabel dampak sosial mampu menjelaskan variasi sebesar 47,3 (untuk program keseluruhan), sebesar 34,42 (untuk program KUBE) dan 63,92 (untuk program PPK). Dukungan faktor/dimensi terhadap variabel dampak sosial untuk program keseluruhan relatif tinggi (sebesar 64,2 s.d 75,6), untuk program KUBE relatif sedang (sebesar 43,4 s.d 68,1) dan untuk Program PPK relatif tinggi (sebesar 79,3 s.d 82,1).

Faktor atau dimensi yang digunakan dalam analisis faktor terhadap variabel dampak psikis mampu menjelaskan variasi sebesar 46,16 (untuk program keseluruhan), sebesar 28,48 (untuk program KUBE) dan sebesar 58,49 (untuk Program PPK). Dukungan faktor/dimensi terhadap variabel

dampak psikis untuk program keseluruhan relatif tinggi (sebesar 58,8 s.d 74,5), untuk program KUBE relatif sedang (sebesar 35,4 s.d 65,1) dan untuk Program PPK relatif tinggi (sebesar 72,5 s.d 80,9).

Faktor atau dimensi yang digunakan dalam analisis faktor terhadap variabel dampak budaya untuk program keseluruhan mampu menjelaskan variasi sebesar 48,52, sebesar 26,10 (untuk program KUBE) dan sebesar sebesar 59,9 (untuk Program PPK). Dukungan faktor/dimensi terhadap variabel dampak budaya untuk program keseluruhan relatif tinggi (sebesar 63,9 s.d 77,8), untuk Program KUBE relatif rendah cenderung sedang (sebesar 22,4 s.d 69,9), dan untuk Program PPK relatif tinggi (sebesar 68,2 s.d 83,6).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh:

1. Secara obyektif, mayoritas subyek penelitian dalam kategori miskin karena memiliki penghasilan di bawah standar KFM Kab. Jayapura. Ini mengindikasikan, bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tepat sasaran. Secara subyektif, sebelum mengikuti program pengentasan kemiskinan, mayoritas subyek penelitian menyatakan dirinya dalam keadaan *miskin* dan setelah mengikuti program mayoritas subyek penelitian menyatakan dalam keadaan *cukup*. Hasil analisis membuktikan, bahwa peningkatan pendapatan subyek penelitian sebelum dan setelah mengikuti program pengentasan kemiskinan terbukti signifikan.
2. Fenomena Kemiskinan di Kab. Jayapura sangat spesifik, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi. Hasil analisis membuktikan, bahwa konstruk kemiskinan lokal di Kab. Jayapura berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh indikator pembentuknya, yaitu ekonomi, sosial, psikis dan budaya.
3. Proses intervensi dan kualitas program untuk program keseluruhan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dampak program. Kualitas program berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap dampak program, baik untuk program KUBE maupun PPK. Namun pengaruh proses intervensi terhadap dampak program terbukti bervariasi, yaitu negatif dan signifikan untuk Program KUBE dan positif tetapi tidak signifikan untuk Program PPK.

4. Konstruk proses intervensi berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh indikator-indikator pembentuknya yang terdiri dari tahapan: *engagement, assessment, designing, implementation, evaluation* dan *termination*. Konstruk kualitas program berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh indikator-indikator pembentuknya yang terdiri dari: *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness* dan *sustainability* dan konstruk dampak program berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh indikator-indikator pembentuknya yang terdiri dari aspek: ekonomi, sosial, psikis dan budaya.
5. Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura terbukti memiliki dampak secara signifikan terhadap peningkatan aspek ekonomi, sosial, psikis dan budaya dalam kehidupan subyek penelitian:
  - a. Dari aspek ekonomi, hasil uji beda menunjukkan bahwa, pendapatan subyek penelitian sebelum dan setelah mengikuti program pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan secara signifikan, baik untuk program keseluruhan maupun untuk masing-masing program (KUBE/PPK).
  - b. Hasil analisis membuktikan, bahwa dukungan faktor/dimensi terhadap variabel dampak, untuk Program PPK relatif lebih besar dibandingkan Program KUBE. Ini mengindikasikan, bahwa Program PPK (program lokal) relatif lebih efektif untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Jayapura dibandingkan Program KUBE (program sektoral).

### **Saran**

1. Bagi Pengelola Program Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Pusat yakni Kementerian Sosial RI.

- a. Perlu digunakan indikator kemiskinan lokal (baik secara obyektif maupun subyektif) dalam mengidentifikasi kemiskinan dan dalam perumusan kebijakan/ program pengentasan kemiskinan di daerah.
  - b. Menyempurnakan pendekatan KUBE yang memungkinkan dipertimbangkannya unsur kearifan lokal yang ada, sehingga proses intervensi yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup sasaran program serta memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan.
  - c. Kebijakan/program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan hendaknya integratif, tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi saja, namun juga menyangkut pengembangan aspek sosial, psikis dan budaya. Hal ini karena kemiskinan yang ada di Kabupaten Jayapura sangat spesifik dan terbukti multidimensi.
  - d. Memfasilitasi pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional pekerja sosial di daerah atau penyelenggaraan diklat pekerjaan sosial bagi petugas daerah yang tidak memiliki latar belakang ilmu pekerjaan sosial dalam rangka mempercepat program pengentasan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial yang semakin kompleks di daerah.
2. Bagi Pengelola Program Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten.
- a. Perlu menggunakan indikator kemiskinan lokal dalam proses assesment (penentuan sasaran & dalam pemilihan program pengentasan kemiskinan yang relevan di daerah).
  - b. Perlu menjalin kerjasama yang sinergis antara pengelola program pengentasan kemiskinan di tingkat propinsi dan kabupaten serta dengan petugas di tingkat distrik/kampung sehingga proses intervensi yang dilakukan optimal dan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup subyek penelitian.
  - c. Perlu menjalin kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha/swasta maupun masyarakat sipil di daerah dalam rangka menyukseskan program pengentasan kemiskinan secara integral dan komprehensif.

- d. Proses intervensi perlu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang benar & program yang telah ditetapkan hendaknya dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara rutin sehingga perkembangan/ kemajuan program dapat dipantau secara berkelanjutan dan dampak program terhadap subyek penelitian dapat diukur.
  - e. Mayoritas petugas tidak memiliki latar belakang ilmu pekerjaan sosial, sehingga banyak mengalami kendala dalam mengelola program pengentasan kemiskinan maupun program pelayanan sosial lainnya. Untuk itu, petugas perlu difasilitasi untuk mengikuti diklat profesi pekerjaan sosial sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.
3. Bagi Pengelola Program Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Distrik.
    - a. Sebagai ujung tombak pembangunan kesejahteraan sosial di tataran *grassroot*, petugas perlu menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, terutama dalam melakukan proses intervensi program pengentasan kemiskinan.
    - b. Pendampingan kepada sasaran program perlu dilaksanakan secara kontinyu (berkelanjutan) sehingga program yang dilaksanakan dapat berdampak secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan subyek penelitian.
    - c. Monitoring dan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.
  4. Bagi Peneliti yang berminat untuk mengembangkan dan mengkaji lebih mendalam sehubungan dengan penelitian ini disarankan agar;
    - a. Penelitian ini perlu dikembangkan secara lebih mendalam dengan subyek penelitian yang lebih luas, sehingga dapat ditemukan indikator kemiskinan yang lebih terukur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kemiskinan dan dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang relevan.

- b. Peneliti lain dapat mengembangkan model penelitian dampak program pengentasan kemiskinan dengan kombinasi beberapa variabel yang berbeda.
- c. Perlu dikembangkan pendekatan atau metodologi yang lebih bervariasi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

### **Daftar Pustaka**

- Amelia Maika. (2009). *Mengukur kemiskinan subyektif di Indonesia: Eksplorasi faktor yang membuat seseorang merasa miskin*. Yogyakarta: Makalah Seminar, 19 Februari.
- Arif Muttaqien. (2006). *Paradigma baru pemberantasan kemiskinan, rekonstruksi arah pembangunan menuju masyarakat yang berkeadilan, terbebaskan dan demokratis* dalam Arif Mutaqien dkk, *Menuju Indonesia sejahtera*. Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Asep Suharyadi & Sudarmo Sumarto. (2001). *The chronic poor, the transient poor and the vulnerable in Indonesia before and after the crisis*, Jakarta: Working Paper, The SMERU Research Institute
- Biro Pusat Statistik Indonesia, (2000a). *Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia 1976 – 1999 metode BPS, seri publikasi Susenas mini 1*, Jakarta : BPS
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Jayapura. (2006,2007,2008,2009). *Kabupaten Jayapura dalam angka*. Jayapura: BPS Kabupaten Jayapura.
- Bodgan, R.L & Taylor,S.J. (1984). *Introduction to qualitative research methods the search for meanings*. New York: John Wikey & son, Inc.
- Brannen, Julia. (2005). *Memadu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Cohen, Jacop. (1977). *Statistical power analisis for the behavioral science*. New York San Fransisco London: A Subsidiary of Harcourt Brace Jovanovich, Publisher.

- Cox, D. (2004). *Outline of presentation on poverty alleviation programs in The Asia-Pacific Region*. Makalah disampaikan pada Internasional seminar *on curriculum development for social work education in Indonesia*. Bandung: STKS, 2 Maret.
- Departemen Sosial. (1997). *Peranan pembangunan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Joreskog & Sorbom. (1996). *Lisrel 8: user's reference guide (2st edition)*. Chichago,II: Scientific Software International.
- Midley, James. (1995). *Social development: The development perspective in social welfare*. London: Sage publication.
- Narayan, Deopa. (2002). *Empowment and poverty reduction a source book*. Washington,DC: The World bank
- Poister, T.H. (1978). *Public program analysis: applied research methods*. Baltimore: University Press.
- Poli, W.I.M. & M. Dahlan Abubakar. (2008). *Suara hati yang memberdayakan: Gagasan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura*. (edisi revisi). Jayapura: Penerbit Identitas Universitas Hasanuddin Makasar.
- Raharjo, Dawam. (2006). *Kemiskinan: Menggali pengalaman pembangunan. dalam menuju Indonesia sejahtera*. Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia
- Setyo Hari Wijayanto. (2008). *Structural equation model*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schyns, Peggy. (2003). *Income and life satisfaction, a cross national and longitudinal study*. Delft: Eburon.
- World Bank, (2007). *Era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT Grha Info Kreasi
- United Nation. (2006a). *Millenium Development Goals indicator database*. Departemen of Economic and Social Affairs, Statistic Division. New York. (<http://mdgs.un.org>.) Accessed May 2008.